

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara prinsip, proses pembangunan ekonomi mencakup sejumlah tindakan strategis dan langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga, menciptakan peluang pekerjaan yang lebih banyak, mengurangi kesenjangan dalam pendapatan, memperkuat interkoneksi ekonomi antar wilayah, dan mengalihkan fokus ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Dengan kata lain, inti dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan penduduk sambil menjaga prinsip-prinsip keadilan yang adil (sebagaimana dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2008). Proses ini melibatkan serangkaian upaya kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat yang lebih merata dari perkembangan ekonomi yang terus berlanjut. Dengan cara ini, pembangunan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang kesejahteraan sosial dan distribusi yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Agar proses desentralisasi dapat terlaksana dengan baik, penerapan otonomi daerah harus menjamin manajemen keuangan yang lebih adil, merata, melibatkan partisipasi aktif, transparan, serta mempertanggungjawabkan. Penyediaan dana yang dialokasikan untuk pemerintahan lokal dan upaya desentralisasi didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan hal ini harus menjadi prioritas utama. Selain itu, peningkatan sumber daya seperti tenaga kerja yang berkualitas, modal yang memadai, serta kemajuan teknologi dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pusat menghadapi keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari otonomi daerah. Manfaat dari opsi ini meliputi ekspansi pusat pengambilan keputusan, percepatan proses pengambilan keputusan, peningkatan respons keputusan terhadap isu-isu lokal yang lebih realistis dan obyektif, pengurangan biaya, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk membuat keputusan sulit tentang strategi pembangunan daerah. Strategi pengembangan adalah kegiatan yang memungkinkan dengan persyaratan anggaran yang realistis.

Perencanaan belanja yang efisien adalah suatu tahapan yang dijalankan pada periode yang akan datang dan diuraikan secara rinci dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD mencatatkan semua sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran pemerintah daerah, menjadikannya sebagai landasan utama dalam penyusunan anggaran operasional daerah. Anggaran ini digunakan untuk menyiapkan anggaran pemerintah daerah. Pentingnya perencanaan belanja yang tepat terlihat dalam peran utama APBD sebagai alat yang memberikan visibilitas terhadap sumber-sumber pendapatan yang tersedia bagi pemerintah daerah dan sekaligus sebagai panduan dalam menentukan alokasi anggaran. Dokumen APBD ini menjadi kerangka kerja yang mengatur bagaimana pemerintah daerah akan mengalokasikan sumber daya finansialnya guna mendukung program-program dan proyek-proyek yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan daerah tersebut. Pemerintah pusat seharusnya tidak bertanggung jawab untuk menyeimbangkan anggaran daerah otonom; sebaliknya, daerah-daerah tersebut harus fokus untuk menciptakan sistem keuangan mandiri mereka sendiri dan memprioritaskan anggaran yang didanai oleh pendapatan daerah.

Meningkatkan penyampaian layanan publik dan mendorong penerimaan daerah (PAD) dan pertumbuhan daerah dengan sumber daya yang terbatas merupakan tantangan umum bagi daerah otonom. Ini berarti daerah perlu menemukan pendekatan yang berbeda untuk masalah ini. Dua pendekatan termasuk

meningkatkan belanja modal (sebagai investasi pemerintah daerah) dan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia. Khususnya di lokasi dengan sumber daya keuangan yang kecil, hal ini sangat dibutuhkan (Halim, 2001).

Semua daerah otonom Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, menghadapi tantangan ini dan berupaya mengatasinya. Salah satu provinsi di Sumatera, Jambi, memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat (5,41 persen per tahun). Selain itu, pertumbuhan tahunan PDRB telah menjadi tren yang konsisten. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang signifikan baru-baru ini di Jambi, kesenjangan regional dalam pembangunan tetap berada pada tingkat krisis. Variasi IPM, pendapatan per kapita, dan angka kemiskinan antar kabupaten dan kota menjadi indikatornya.

Perekonomian Provinsi Jambi masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diatasi sebelum mencapai potensi pengembangannya. Tidak Ada Perubahan Signifikan Masih diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur yang sebanding dengan tren belanja daerah. Sumber daya manusia secara keseluruhan menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih belum dapat memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya aparatur dan modalnya, yang berdampak pada kebijakan terkait pembangunan.

Mendeklarasikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat lokal atas prakarsa sendiri melalui usaha masyarakat adalah yang kita maksud ketika kita berbicara tentang otonomi daerah. Daerah Tingkat II atau Kabupaten/Kota menekankan otonomi dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menunjukkan legitimasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merencanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai kekayaan daerah. Oleh karena itu, informasi tentang kabupaten dan kota di Provinsi Jambi menjadi dasar penelitian ini.

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	9.408,0	9.912,5	10.466,7	11.291,3	12.225,7
Merangin	14.452,8	15.288,1	15.698,9	17.886,8	20.284,1
Sarolangun	14.502,5	15.126,9	14.443,8	16.635,8	20.772,1
Batang hari	15.663,9	16.463,3	16.401,5	18.810,8	24.305,0
Muaro jambi	22.961,0	24.295,0	24.419,8	27.750,0	32.968,5
Tanjabtim	24.111,7	24.680,3	19.475,3	21.881,3	25.606,2
Tanjabbar	41.458,3	42.945,5	37.097,8	42.039,5	50.081,5
Tebo	13.839,1	14.593,4	14.746,7	16.960,4	19.702,2
Bungo	17.303,3	17.895,9	17.315,2	20.153,1	24.926,3
Kota Jambi	28.797,4	30.636,9	29.511,7	31.918,1	36.142,0
Kota Sungai Penuh	6.951,1	7.479,4	7.562,3	7.980,9	8.680,2
Provinsi Jambi	207.878,7	216.927,7	206.242,6	233.725,5	275.693,7

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa PDRB ADHB Provinsi Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, PDRB ADHB Provinsi Jambi mencapai angka Rp 207.878,7 milyar, dan meningkat menjadi Rp 275.693,7 milyar pada tahun 2022. Pada tahun 2018, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Kabupaten/Kota dengan PDRB ADHB tertinggi, yaitu sebesar Rp 41.458,3 milyar. Sementara itu, Kota Sungai Penuh merupakan Kabupaten/Kota dengan PDRB terkecil pada tahun tersebut, dengan angka Rp 6.951,1 milyar. Pada tahun 2022, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali mencatatkan PDRB tertinggi, mencapai Rp 50.081,5 milyar, sementara Kota Sungai Penuh masih memperoleh PDRB terkecil, yaitu Rp 8.680,2 milyar.

Setiap daerah di Provinsi Jambi memperhatikan PDRB provinsi secara keseluruhan. Karena kemakmuran suatu bangsa dapat diukur antara lain dengan tingkat ekspansi ekonominya. Pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi diklasifikasikan sebagai belanja modal, termasuk alokasi dana untuk

proyek infrastruktur. Untuk menghadapi dampak yang lebih luas dari krisis ekonomi tahun 2008, disarankan untuk memberikan stimulus dalam bentuk paket belanja modal yang bertujuan meningkatkan infrastruktur. Menurut laporan Bank Dunia (2010), belanja modal sering kali memiliki efek pengganda yang lebih besar daripada belanja konvensional, sementara pengeluaran untuk barang dan jasa memiliki efek pengganda yang lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak.

Hubungan empiris antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi subjek dari beberapa penelitian. Namun, hasil studi yang menginvestigasi dampak dari peningkatan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak konsisten. Berdasarkan penelitian BAPPENAS (2007), mereka menemukan bahwa peningkatan belanja modal pemerintah sebagai bagian dari strategi fiskal pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi makro, baik di tingkat nasional maupun daerah dalam konteks perekonomian Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Parmawati (2010), yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja investasi dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDRB), namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal. Namun, hasil penelitian Anasmen (2009) menghadirkan temuan yang bertentangan, di mana belanja modal pemerintah di tingkat kota atau provinsi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan PDRB. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Hamzah & Setiyawati (2007), yang menyimpulkan bahwa belanja pembangunan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut hipotesis Harrod-Domar, kondisi ekonomi yang stabil terkait dengan tingkat produksi modal di suatu negara, dan belanja modal sektor publik dianggap sebagai indikator yang paling berpengaruh terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Manfaat belanja langsung daerah, yang meliputi penanaman modal, dirasakan langsung oleh masyarakat dan bertahan lama setelah

satu siklus anggaran karena digunakan untuk memperoleh aset tetap atau menambah kekayaan daerah. dampak terhadap kualitas pelayanan publik Dasar pemikiran di balik restrukturisasi APBD pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan proporsi belanja modal terhadap belanja operasional.

Tabel 1.2. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Milyar Rupiah)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	191,87	293,81	216,76	165,03	123,24
Merangin	207,24	226,73	274,68	342,89	73,72
Sarolangun	215,17	414,97	247,73	158,70	184,69
Batang hari	148,21	251,12	150,46	177,30	276,41
Muaro jambi	292,73	322,19	262,78	268,24	234,98
Tanjabtjm	312,96	328,87	229,23	229,95	290,56
Tanjabbar	419,66	697,23	353,97	404,37	381,43
Tebo	258,99	269,09	139,86	222,21	374,49
Bungo	203,21	234,63	153,99	103,30	95,52
Kota Jambi	445,81	432,10	444,35	495,81	378,62
Kota Sungai Penuh	194,68	176,54	134,64	168,82	140,13
Provinsi Jambi	784,72	866,50	1.056,47	642,70	906,8

Sumber : DJBP kemenkeu Kab/kota Provinsi Jambi

Dari data tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa belanja modal pada tahun 2018 sampai 2022. Belanja modal paling tinggi diduduki oleh Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 381,43 milyar rupiah. Sementara belanja modal terkecil pada Tahun 2022 pada Kabupaten Merangin sebesar 73,72 milyar rupiah. Hal ini meningkat jauh dibandingkan pada Tahun 2018, dimana Kota Jambi dengan belanja modal tertinggi di Provinsi Jambi (445,81 milyar rupiah), sementara Kabupaten dengan belanja modal paling rendah pada Tahun 2018 adalah Kabupaten Batang hari (148,21 milyar rupiah). Provinsi Jambi dapat diketahui mengalami fluktuasi belanja modal setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 belanja modal Provinsi Jambi sebesar 784,72 milyar rupiah dan terus meningkat hingga Tahun 2022 menjadi 906,8 milyar rupiah.

Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) diduga berperan dalam menentukan besaran realisasi belanja modal. Pengeluaran modal (*investment expenditure*) yang dilakukan pemerintah, terutama untuk hal-hal seperti infrastruktur, dianggap kondusif untuk ekspansi ekonomi. Berinvestasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan output sektor swasta. Pemerintah di semua tingkatan harus menaikkan belanja modal mereka dibandingkan dengan belanja operasional mereka karena dampak positif yang dapat ditimbulkan oleh belanja modal terhadap pelayanan publik.

Output suatu daerah tidak hanya dipengaruhi oleh Belanja Modal tetapi juga oleh Tenaga Kerja. Dengan begitu banyak orang untuk dipekerjakan, kita dapat mengharapkan ekonomi yang kuat. Namun, dikhawatirkan pertumbuhan populasi dapat memperlambat pembangunan ekonomi. Todaro (2000) berpendapat bahwa ekspansi populasi yang cepat memicu munculnya masalah keterbelakangan dan selanjutnya mengurangi peluang pembangunan. Bukan hanya ekonomi yang perlu dikembangkan, tetapi bidang lain seperti angkatan kerja juga. Pekerja dalam perekonomian diukur dengan angkatan kerja. Orang usia kerja yang sekarang bekerja atau yang memiliki pekerjaan tetapi sedang menganggur dan sedang mencari pekerjaan dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja. Pekerja dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan merupakan setengah dari angkatan kerja.

Setiap anggota populasi suatu negara (berusia 15-64 tahun) yang mampu dan mau menghasilkan barang dan jasa sebagai respons terhadap permintaan pasar dianggap tenaga kerja. Ini berarti bahwa setiap orang di negara yang berusia di atas 15 tahun dianggap berada dalam angkatan kerja. Hal ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan no. 25 Tahun 1997. Pada tanggal 1 Oktober 1998, undang-undang ini resmi berlaku.

Usia 15 tahun dipilih sebagai titik awal karena banyak orang di Indonesia, terutama di pedesaan, yang sudah bekerja atau mencari pekerjaan saat itu. Mirip dengan tidak adanya usia pensiun wajib di Amerika Serikat, Indonesia tidak

memberlakukannya pada tenaga kerjanya. Tunjangan hari tua hanya tersedia untuk sebagian kecil penduduk, terutama pekerja pemerintah dan sebagian dari tenaga kerja sektor swasta. Penghasilan dari sumber ini masih belum mencukupi bagi penduduk ini, sehingga mereka yang telah mencapai usia pensiun seringkali tetap bekerja untuk memenuhi kewajiban keuangannya (Simanjuntak, 1998). Istilah "tenaga kerja" mengacu pada angkatan kerja dan orang-orang yang tidak secara aktif terlibat dalam tenaga kerja produktif (bukan angkatan kerja).

Seperti yang sudah diketahui, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan salah satu kendala yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami perkembangan, dihadapkan pada tantangan serius dalam hal ketenagakerjaan. Masalah pengangguran sering muncul ketika terdapat ketidakcocokan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Masalah pengangguran bukanlah hal yang sepele dan dapat berdampak luas pada perekonomian sebuah negara. Salah satu indikator kemajuan pemerintah adalah sejauh mana mereka mampu menciptakan lapangan kerja. Penciptaan dan ekspansi kesempatan kerja akan memberikan dampak positif pada pemanfaatan tenaga kerja yang ada, yang pada gilirannya akan meningkatkan upah dan daya beli, yang keduanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi penting untuk diingat bahwa tidak setiap lowongan pekerjaan mengarah ke pekerjaan, dan bahkan orang yang bekerja penuh dapat memilih untuk bekerja lebih dari satu pekerjaan.

Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Ribu Jiwa)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	127,5	120,0	127,2	131,0	136,3
Merangin	186,7	186,9	190,7	192,1	193,7
Sarolangun	136,0	135,0	141,8	137,2	144,0
Batang hari	122,9	114,4	128,3	132,6	124,8
Muaro jambi	194,0	183,4	194,7	202,9	222,4
Tanjabtjm	114,2	112,1	119,9	115,5	119,1
Tanjabbar	174,9	165,9	179,8	179,6	172,1
Tebo	175,0	175,4	180,5	181,5	183,2
Bungo	172,6	166,1	168,5	168,4	183,6
Kota Jambi	276,0	283,6	265,2	263,0	276,4
Kota Sungai Penuh	45,3	41,0	42,4	43,1	42,2
Provinsi Jambi	1.724,9	1.683,6	1.739,0	1.746,8	1.797,8

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023

Dilihat dari data tabel 1.3 bahwa jumlah yang bekerja di provinsi jambi terbagi dalam 11 kabupaten/kota. Karakteristik setiap daerah berbeda-beda mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Jumlah orang yang bekerja pada setiap kabupaten/kota dari tahun ketahun mengalami fluktuasi. Tenaga kerja pada Provinsi jambi mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2022, dimana pada tahun 2018 sebesar 1.724,9 ribu jiwa dan meningkat menjadi 1.797,8 ribu jiwa pada tahun 2022.

Selain itu, masalah pengangguran memang sulit diperdebatkan dan menjadi isu penting karena bisa dikaitkan dengan berbagai faktor. Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB negara, inflasi, kemiskinan, dan tingkat gaji. Penurunan tingkat pengangguran diharapkan akan mengikuti peningkatan tingkat upah jika pertumbuhan ekonomi di suatu negara membaik. Tingkat pengangguran dapat diturunkan jika upah dinaikkan. Naiknya tingkat pengangguran akan dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi (Sukirno, 2008).

Tabel 1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (Persen)

Wilayah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	2,74	2,62	2,43	2,32	2,63
Merangin	3,47	3,68	4,86	4,83	4,69
Sarolangun	4,06	4,09	5,71	5,52	5,22
Batang hari	3,87	4,56	4,42	4,26	3,53
Muaro jambi	4,52	5,20	5,43	5,59	5,35
Tanjabtim	1,80	1,63	1,41	1,56	1,32
Tanjabbar	2,38	2,57	2,16	2,53	2,88
Tebo	2,00	2,90	2,95	2,83	1,38
Bungo	3,03	3,82	5,94	5,86	5,50
Kota Jambi	6,41	6,53	10,49	10,66	8,95
Kota Sungai Penuh	5,13	4,00	5,56	3,00	2,49
Provinsi Jambi	3,86	4,19	5,13	5,09	4,59

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2023

Dari data yang tercantum dalam Tabel 1.4, dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jambi mencapai 3,86 persen dan meningkat menjadi 4,59 persen pada tahun 2022. Selain itu, berdasarkan data dalam tabel tersebut, terlihat bahwa Kota Jambi merupakan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tertinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 8,95 persen. Sementara itu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang paling rendah, yaitu 1,32 persen.

Dari berbagai penjelasan di atas, terlihat bahwa hubungan antara belanja modal, tenaga kerja, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dapat memiliki hasil yang positif maupun negatif. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal, tenaga kerja, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan studi kasus di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, skripsi ini akan secara komprehensif menggali topik tersebut dengan judul **“Determinan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan sebelumnya, yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
2. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal, tenaga kerja, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara ilmiah terutama terhadap kajian mengenai pengaruh belanja modal, tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka terhadap PDRB di Provinsi Jambi. Belanja modal, angkatan kerja, dan pengangguran merupakan indikator makro yang kerap menjadi perhatian, sehingga diharapkan kajian ini dapat menjadi referensi baru bagi penelitian - penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi para pemaku kepentingan (*stakeholder*) terkait, terutama di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kualitas perekonomian Provinsi Jambi.